

**TRANSFORMASI IMAN INDONESIA DI DALAM
THEOLOGI-POLITIK KEBANGSAAN INDONESIA
(Upaya menemukan kembali dan menerapkan Agama Sipil Indonesia)**

Dinson Saragih

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia Bandar Baru

Abstrak

Tiada yang paling sulit untuk melakukan sesuatu, sebelum mengenal jati diri sendiri. Indonesia, menurut beberapa pemikir mengatakan bahwa perlu menetapkan pendiriannya sebagai orang Indonesia, selaku umat beragama apapun dia telah mengaku iman nya-oleh para pendahulunya: “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” melahirkannya selaku bangsa yang merdeka, sejak enam puluh tahun yang lalu; namun tetap ada upaya generasi untuk melupakannya. Orang Indonesia yang ‘plural’ suku dan agama, telah memiliki konsensus bersama dalam aras politik yaitu “Semua buat semua “. Suatu karya Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia yang diyakini pendiri bangsa lewat sejarahnya; yang perlu disakralkan dalam arti diimplementasikan secara regenerasi di seluruh area dan sepanjang era.

Kata Kunci: Transformasi, Iman, Indonesia, Teologi, Kebangsaan, Agama Sipil, Indonesia

Pendahuluan:

Dalam tulisan ini, saya memakai istilah ‘Iman Indonesia’ sebagai ungkapan iman bersama bangsa Indonesia sebagai bangsa multi-agama dan multi-kultur, hidup keberagamaan (religiusitas) dalam tataran kerohanian. Setiap individu Indonesia bersama-sama mempercayai bahwa “TUHAN YANG MAHA KUASA” turut bekerja-merahmati bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya, tanpa membedakan nama atau institusi agama-agama yang ada. “Tuhan” adalah ungkapan khas Indonesia terhadap”Yang Mutlak”, yang keberadaannya “Yang Maha Esa”. Inilah iman keberagamaan orang Indonesia yang penuh keunikan ke-”plural”-annya. Sehingga kalau mungkin juga disebut jemaah Indonesia; sehati sepikir mengisi kemerdekaannya. Agama, politik dan ekonomi saling terkait dalam fenomena sosial suatu negara. Dalam tulisan ini diadakan pendekatan dari segi agama dan politik demi ekonomi. Agama selalu menjadi tantangan yang paling sulit dalam proses kebijakan suatu negara. Karena itu, istilah ‘governance’ mengarahkan pemahaman bahwa upaya perubahan perbaikan negara secara dua arah, yaitu dari pihak pemerintah dan warga. Baik pemerintah maupun warga secara bersama-sama tidak saling menunjuk “mereka”, tetapi “kami”. Saya merujuk tulisan ini kepada Teoritisi, yaitu Emile Durkheim: “Kesadaran akan pranata moral bersama masyarakat sebagai yang sacral” dan Max Weber: “Etika persaudaraan yang rasional “. Bagi Durkheim pranata akan memperbaiki individu. Bagi Max Weber, manusia digerakkan dari dalam bathin-nya yaitu keyakinannya’. Perbaikan individu akan menghasilkan perbaikan pranata fenomena masyarakat.

Dasar pemikiran mengenai ‘textile sosial-politik’ Indonesia:

Benih nasionalisme Indonesia terorganisir sejak berdirinya Budi Utomo (1908). Pada tahun itu juga dibentuk Perkumpulan Mahasiswa Indonesia yang belajar di Eropa, bernama Indische Vereniging. Pada tahun 1922, nama ini diganti menjadi Indonesische Vereniging. Selanjutnya tahun 1925, nama ini diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Para mahasiswa (Mohamad Hatta dkk) bersatu di rantau orang

yang memberi wajah Hindia (Indonesia).¹ Kemudian ‘Indonesia’ digunakan oleh para Pemuda Nusantara dalam Kongres Pemuda, menghasilkan kesepakatan “Sumpah Pemuda” mengenai : Bangsa, Bahasa dan Tanah Air INDONESIA. Di dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menegaskan bahwa General Will kebangsaan Indonesia:” Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”.² Akhirnya, nama ini dideklarasikan ke dunia Internasional dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu, dunia mengenal Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tuk Setyohadi menuliskan perjalanan rasa nasionalisme bangsa Indonesia disarikan:

Rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia (sejak masa penjajahan Belanda) menjadi bangsa merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah berkat kegigihan para tokoh politik yang mampu menyerap nilai-nilai universal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Setelah Jepang menyerah pada Negara Sekutu, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam lambang ‘Bhineka Tunggal Ika’ dengan menyadari perlunya persatuan nasional diantara berbagai suku, ras dan agama. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta, kewalahan menghadapi pertikaian politik, sehingga Dwi Tunggal pecah pada Desember 1956. Presiden Sukarno menetapkan Demokrasi Terpimpin dengan landasan Nasakom. ..sebagai akibat tidak mampunya Dewan Konstituante, hasil Pemilu 1955 membentuk Konstitusi pengganti UUDS-1950, sebagai akibat per tentangan keras dalam upaya memasukkan Syariah Islam ke dalam UUD yang baru. Peristiwa G30S/PKJ menjadi puncak keruntuhan Orde Lama, memasuki Orde Baru. Sayangnya, berlaku penyimpangan dalam bentuk Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Keterlibatan keluarga Presiden (Suharto) dan para konglomerat yang merusak implementasi mekanisme pemerintahan...Krisis ekonomi berlanjut ke krisis politik, pemerintahan Orde Baru digantikan Orde Reformasi. Presiden Habibie dalam menyelenggarakan agenda Reformasi, kurang bertumpu pada ‘platform politik’. Akhirnya mengalami kegagalan besar oleh masalah Timor Timur (disebutnya ‘kerikil di dalam sepatu). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Presiden, menggantikan Habibie, dengan harapan dapat mengatasi berbagai krisis dan konflik antar golongan dan mengadili Suharto. Harapan ini tak terpenuhi. Kemudian Megawati Sukarnoputri terpilih menjadi Presiden, ia menghadapi ‘disintegrasi bangsa’ (Aeek dan Papua) bahkan Teroris Al-Qaeda bersarang di Solo-Indonesia. Ditandai dengan perang antar penduduk Islam dan Kristen di Ambon. Reserse Kepolisian berhasil menangkap panglima Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib di Bandara Djuanda Surabaya. . ..ditanggapi oleh beberapa politisi bahwa penangkapan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menghalangi pergerakan Islam.”³

Dari sejarah singkat ini, kita menarik benang merah kebijakan politik, dan agama serta ideologi di Indonesia, dalam memperjuangkan kemerdekaan Nasionalisme begitu militan. Setelah kemerdekaan tercapai terjadi kompetisi primordial; pertama oleh ideolgi komunis (Nasakom), keuntungan kelompok (KKN), keagamaan dengan lahirnya ICMI yang diketuai BJ.Habibi, sebagai aliansi cendekiawan Muslim dengan pemerintah Orde Baru dalam rangka memenangkan PEMILU 1992 serta merta menjadi wadah politik Islam untuk mencapai kekuasaan*4. Menyusul gencarnya Teroris Al-Qaeda bernuansa Islam yang menimbulkan ketidakamanan sehingga memanasnya disintegrasi dan keengganan para investor menanam modal di Indonesia. Dasar negara, Pancasila dan UUD 1945 terus menghadapi tantangan oleh sebahagian warga Indonesia demi negara Islam. Salah satu contoh kasus diuraikan oleh Bung Hatta:

¹Z. Yasni, Bung Hatta menjawab. Gunung Agung : Jakarta, 1980, hal. 105.

²Saafudin Bahar dkk, Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995,p. 71.

³Tuk Setyohadi, Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa, Rajawali Corporation Bogor, 2003, hal. 229-240,

Suasana yang bertele-tele waktu konstituante membicarakan masalah Dasar Negara selama bebenapa tahun; golongan Islam mempertahankan negara Islam. Secara demokrasi boleh saja. Tetapi golongan Islam yang berjumlah 48% dalam konstituante waktu itu kalah. Tetapi tidak segera mengaku kalah, dan meneritna Pancasila. Lantas PKI-lah yang muncul menjadi 'Pembela' Pancasila. Akhimya pada bulan Juli 1959, Bung Karno membubarkan Konstituante (dikeluarkannya Dekrit Presiden: Kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Pendek kata, saya telah senantiasa memberikan peningatan-peningatan tentang hal-hal itu pada waktunya.⁴

Sekitar persoalan dasar negara, PKI selalu menjadi oportunist yang licik memasuki celah pergulatan antara Islamis dan Nasionalis (Pancasilais), hal ini tampak dalam pergerakan mereka pada tahun 1926, 1948 dan 1965, akhirnya PKI dibubarkan dan Marxisme dilarang di Indonesia sesudah G30S/PKI oleh Suharto selaku pengemban SUPERSEMAR. Sekalipun organisasi PM dilarang, bukanlah menjamin bahwa Komunis tidak ada di Indonesia. Kini Nasionalisme Indonesia menghadapi dominasi agama, disintegrasi dan resesi ekonomi dimana kemiskinan dan pengangguran bertebaran menuntut perhatian serius.

Dalam keadaan Indonesia sekarang yang serba kabur, perlu kita menyadari dan mengantisipasi serangan ekonomi dan luar bahwa Indonesia bisa menjadi sasaran empuk korban ekonomi internasional di karenakan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tetapi lemah kualitas ideologi nasionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). Sukarno memperingatkan: "Imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain tetapi bisa juga berupa hawa nafsu atau sistem mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Tidak usah dengan perang kekerasan senjata tetapi bisa juga dengan 'putar lidah' atau cara 'halus-halusan'⁵ Disayangkan, karena Sukarno menghadapi imperialisme pada masa pemerintahannya berkolaborasi dengan komunisme (Ala RRC), bukan cara Indonesia (Pancasila dan UUD'45). Bung Hatta mengingatkan Bung Karno dan juga kita sekarang ini, bahwa politik itu berarti memandang jauh ke depan, dengan berkata:

"Di saat menderita, keimanan dan kepribadianlah yang menentukan; bukan ajaran dan teori yang bagaimanapun. Memegang teguh kepada prinsip, yaitu Undang-Undang Dasar. Untuk mencegah berbagai pemberontakan perlu diberi kebebasan mengeluarkan pendapat, membuka ekonomi yang tidak didominasi investasi luar negeri dan meningkatkan pendidikan mengenai Pancasila. Kita percepat usaha untuk mengurangi kemiskinan dan perbedaan kaya dan miskin. Hasil usaha pembangunan jangan mempertajam perbedaan itu. Meningkatkan persatuan dan kesatuan 'unity in diversity'. Pun saya tekankan bahwa Pegangan Bersama segala aliran Indonesia untuk bersatu adalah Pancasila. Pancasila perlu disakralkan, disakralkan bukan berarti dianggap barang suci seperti agama, tidak. Disakralkan dalam arti dijadikan satu dengan jiwa dan perbuatan kita, karena kita adalah negara hukum.

Bung Hatta menekankan agar bangsa Indonesia, pemerintah dan warganya mesti memegang teguh dan mensakralkan prinsip hukum Nasionalisme Indonesia yaitu UUD'45 dan Pancasila, dimana termaktub tema umum di dalamnya, yaitu Rakhmat Tuhan dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur, untuk mempersatukan gerak langkah mengatasi fenomena yang ada dalam rangka proses perjuangan

⁴Jan S.Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BPK-GM, Jakarta, 2004, hal.459.

⁵Z. Yasni, Bring Hatta menjawab, hal. 84.

mengisi kemerdekaan, yaitu kesejahteraan umum. Hal ini berarti bahwa setiap individu manusia, mengutamakan kepentingan umum, kemudian pribadi.

Dewasa ini, banyak para intelektual yang memotret fenomena sosial Indonesia. R.N Bella mencatat ungkapan intelektual Indonesia, Soedjatmoko mengatakan bahwa Indonesia kini “krisis identitas”⁶ Tekstil sosial Indonesia mengalami detardasi dari hakikatnya. Bhinneka Tunggal Ika yang Pancasila telah rada pudar. Undang-Undang Dasar 1945 yang adalah Anggaran Dasar (AD) samar oleh amandemen, sehingga berupa Anggaran Rumah Tangga (ART). Keadaan ini dapat difahami dalam perjalanan suatu bangsa yang relatif muda sebagai proses pendewasaan; sebagaimana Eka Dharmaputera⁷ mengutip pernyataan Clifford Geertz, bahwa ‘Indonesia adalah negara baru dari masyarakat lama’ (*New States of old societies*). Tentu, situasi ini memerlukan “Nation Buliding” ; pembinaan rasa kebangsaan melampaui loyalitas kelompok dalam memakai kedaulatan rakyat secara baik dan benar oleh masyarakat atau para praktisi politik.

Melihat mentalitas masyarakat yang dihimpit krisis ekonomi, justru ‘kesempatan’ bagi para elit politik dalam era reformasi antara desentralisasi dengan UU No.22/1999 dan resentralisasi dengan IJU No.32/2004, memakai segala cara mempengaruhi pilihan rakyat dan sekaligus menghilangkan kedaulatan mereka dengan *money politics* dalam memenangkan Pemilu 2004. Melihat sosial politik sekarang, Kutut Suwondo menulis:

Negara hukum yang dikemukakan Weber, yang menyatakan bahwa Negara mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang syah, dengan menggunakan kekuatan fisik (militer) Untuk menegakkan aturan-aturan yang telah disepakati demi mencapai kesejahteraan. Hanya dengan suatu negara yang kuat (strong state) nafsu rendah manusia untuk saling membunuh dapat dicegah atau dikurangi. Dalam hal ini konsep autoriterian negara (dan Francis Bacon) menjadi penentu di dalam mengatur warganya agar terjadi ketenteraman, kedamaian dan ketenteraman menuju proses pembangunan yang berhasil.⁸

Pemerintah memakai kekuasaan hukum dan militer mengontrol politik. Di sisi lain, para Teolog (dan teori Durkheim dan Weber) ambil bagian memberi pendidikan politik bagi masyarakat demi mempertahankan dan mempercayakan kedaulatan mereka kepada orang yang dapat dipercaya; serta mengajarkan kewirausahaan agar memiliki ekonomi yang kuat. Pemerintah dan warga dituntut bekerjasama dengan berpegang teguh pada prinsip dan mensakralkan Pancasila dan UUD’45 dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana di tekankan oleh Bung Hatta.

Transformasi Iman orang Indonesia:

Era reformasi Indonesia, adalah era yang samar dan sangat membingungkan. Wanisan kolaborasi politik pemerintahan Orde Baru dengan agama tertentu semakinjelas. Memang, memihak kepada kelompok terbanyak lebih menjajilcan perolehan kemenangan dalam demokrasi. Karena itu di dalam masyarakat plural diperlukan keinginan luhur agar dapat hidup tenteram di dalam suatu negara. Dalam hal inilah agama diperlukan, yaitu keagamaan yang berdasarkan keyakinan bersama antar umat beragama akan peran-serta Tuhan di dalam konteks sejarah fenomena ‘tekstil-sosial’ bangsa Indonesia.

Untuk itu, perlu merujuk pandangan Teoretisi mengenai bagaimana fungsi keagamaan itu, Pertama, menurut Emile Durkheim⁹ untuk mengontrol masyarakat diperlukan hukum yang melembaga berdasarkan kesadaran moral bersama masyarakat guna mendidik individu supaya

⁶Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Korban Orde Baru (DPP PAKORBA) - Jakarta, 2001, hal. 9.

⁷Eka Dharmaputera, Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia, BPK-GM Jakarta, 2001, hal. 125.

⁸Kutut Suwondo, Otonomi daerah dan perkembangan Sivil Society. Satya Wacana Presss, 2005,p.3

⁹Tom Campbell, Tujuh teori Sosial,. Penerbit Kanisius-Yogyakarta, 1994, hal. 168.

menahan diri (moderation), membatasi diri (imitation) dan disiplin. Disintegrasi masyarakat dan kelakuan diluar normatif umum, apabila nilai-nilai, peraturan-peraturan tidak lagi diberlakukan individu. Kesadaran umum akan elementer Agama, memperbaild hubungan yang rusak di dalam masyarakat. Agama juga mempenga ruhi masyarakat; namun agama juga berasal dan masyarakat itu sendiri.¹⁰ Agama dan penganut yang benar, terbuka untuk diperbaiki dan memperbaiki. Inilah disebutnya social reform. Kesadaran moral bersama didapat melalui unsur agamawi yang selanj utnya disepakati dan ditetapkan secara bersama menjadi nilai, norma atau hukum atas masyarakat itu sendiri. Dalam pengamatannya tentang Totem di Australia, ia menyimpulkan bahwa masyarakat itulah yang sacral, sebab pada saat mereka melakukan rithus, mereka mengalami rasa menghargai keberadaan, dan integrasi, memelihara dan memperbaiki hubungan antar sesama anggota.¹¹

Kedua, menurut Weber manusia digerakkan dan dalam batinnya yaitu keyakinannya. Jadi bukan karena lemahnya kontrol sosial terhadap individu; melainkan kesera gaman individu, ketidaktahuannya dan gaya penumpasan subjektivitasnya dilihat sebagai yang paling berbahaya di dunia modern. Andersen dan Kaspersen¹² mencatat bahwa menurut Weber ada 4 type tindakan sosial, yakni: Pertama: Nilai *rasional action* yaitu perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai, mis: kasih, keutamaan. Kedua: *Mechanical action* yaitu perilaku yang didasarkan pada cara, tujuan dan hasil yang dicapai. Ketiga: *Affectual action*, tindakan yang didasarkan pada situasi atau perasaan. Keempat: *Tradisional action* yaitu perbuatan yang dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan. Di dalam tindakan tindakan ini menurut Weber, setiap individu harus diberi pemahaman rasional pada saat melakukan sesuatu dengan pertimbangan dan memperhitungkan orang lain; karena orang lain akan merespon tindakan kita. Inilah yang disebut hukum sebab akibat; yang adalah pola interpretasi perilaku. Perubahan sosial dimulai dari perubahan individu, individulah yang mempengaruhi fenomena sosial. Wéber menolak teori revolusi Marx.

Namun kata Weber¹³, modernisme adalah ‘mantel’ (iron cage = sangkar besi) dimana manusia terlena dengan kepuasan-kemewahan, sehingga muncul sosial yang tidak manusiawi. Karena itu, dalam tindakan sosial yang manusiawi dapat terjadi jika ‘nilai’ (value) mempengaruhi ‘pelaksanaan’ (Instrument / mechanism) maka tercipta “Brotherly Love Ethics” (Etika kasih persaudaraan), dimana terjadi sosial yang memandang dan memperlakukan manusia secara manusiawi yang dilayani. Menurut Weber, justru agama memberi kontribusi sentral dalam proses pola pikir rasional masyarakat yang mempengaruhi tindakan sosial yang ideal, yaitu ‘etika persaudaraan’. Dalam masyarakat plural dunia modern ini, diakui kebebasan beragama, hanya mungkin dipersatukan oleh sejumlah nilai yang bersifat umum. Kesesuaian paham dan penghayatan nilai-nilai universal harus menunjang suatu negara atau kelompok sosial.¹⁴

Dalam perjalanan pejuangan kemerdekaan Indonesia, kita telah memiliki warisan elementer keagamaan Indonesia dan para pendiri bangsa kita yang berlatar belakang agama yang sangat plural; yang disebut Durkheim kesadaran moral bersama dan perspektif hidup keagamaan. Para pendiri bangsa

¹⁰ Hotman M.Siahaan, Peingantar ke arab sejarah dan teori Sosiologi, Erlangga-Jakarta, 1986, p.154.

¹¹ Heine Andersen & Lars Bo Kaspersen, :“The more general fimction of religion is to be found its contribution to social integration. And because actors find strength through participation in religious activity, their trust in religious ideas is maintained.”, Classical and Modern Social theory. Blackwell Publishers-Massachussetts USA, 2000,p. 71

¹²ibid, p. 80.

¹³ Ibid,p. 91 :“The choise of values and ideals and the search for meaning beyond soulless calculation of effective means for achieving a certain goal is diaspearing more and more. Modern man is trapped in a rational ‘iron cage of commodities and regulations’ and he has lost his humanitf.

¹⁴K.J. Veeger, Realitas Sosial,, Gramedia-Jakarta, 1993, p. 192.

Indonesia menyadari dan meyakini bahwa “Tuhan” menyertai, merahmati proses perjuangan itu. Keyakinan ini diundangkan didokumenkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.”¹⁵ Para pendiri bangsa mengundangkannya dengan tujuan agar setiap individu bangsa Indonesia melakukannya demi ketertiban Indonesia secara intern dan Intenasional secara exterm. Mereka telah melakukan apa yang dikatakan Weber tentang Etika persaudaraan yang rasional. Inilah jati diri ideologi Indonesia. Para Pendiri bangsa Indonesia yang plural agama dan suku itu menyebut “Yang Mutlak” itu bukan berdasaralcan ‘agama’ / ‘kitab suci’, ‘suku’ tertentu, tapi keyakinan itu diungkapkan dengan budaya Indonesia. Orang Indonesia menyebut “Yang Mutlak” itu “TUHAN” yang keberadaannya “YANG MAHA KUASA” dan sifatNya yang Rahmani terhadap semua manusia Indonesia tanpa membedakan suku dan agama. Atas keyakinan ini disusunlah Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Iman bersama seperti di atas perlu ditransformasikan di dalam segala lapisan masyarakat di dalam dua aras; politik dan keagamaan kebangsaan. Unsur primordial harus digunakan menjadi potensi kepentingan bersama secara nasional, atas dasar *general will* (baik bagi semua) kebangsaan Indonesia “semua buat semua”. Indonesia selaku negara muda mesti mempertahankan kesakralan identitas politik kebangsaannya “semua buat semua” dan identitas aras agama kebangsaannya : TUHAN Yang Maha Kuasa, Yang Rahmani itu di atas segala agama yang ada. Selaku orang yang beriman — taqwa, orang Indonesia tentu memiliki kemiripan sifat dengan Tuhan-nya yaitu “rahmani”. Dengan demikian, setiap individu warga negara Indonesia, dalam langkah politik dan imannya adalah: ‘semua buat semua’ dan ‘atas TUHAN Yang Maha Kuasa-Rahmani’.

Menurut hemat saya, pola ‘iman dan politik’ harus tetap ada di dalam setiap individu; namun bagi orang Indonesia, iman-politik’-nya adalah ‘semua buat semua’ - ‘atas rahmat Tuhan Yang Mahakuasa’ mendasari pola hidupnya dalam interaksi sosial. Mental seperti ini sangat konjungtif dengan teori Durkheim tentang moderation, limitation dan discipline setiap individu, dimana kesadaran moral bersama sebagai sosial kontrol. Apalagi empat type tindakan manusia Indonesia (teori Weber: rational, mechanical, affectual dan traditional) digerakkan dengan kontribusi keagamaan yang bertransformasi dengan Iman — Politik ala Indonesia; niscaya menghasilkan ketertiban Nasional maupun Internasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD’45.

Theologi politik kebangsaan di indonesia:

Melihat dan mengamati kehidupan tekstil sosial-politik Indonesia, rasa nasionalisme terus menghadapi tantangan agama, komunisme, dan ekonomi. Agama diharapkan menjadi ‘kontribusi sentral’, tetapi sikap agama-agama di Indonesia antara mendominasi dan pasif-peyoratif dengan harapan Tuhan bertindak dan atau sibuk mengurus kesalehan diri. R.N. Bellah mendeskripsikan sikap agama-agama terhadap peradaban dunia sejak agama type primitif, arkhais, pra modern dan modern selalu bersikap menolak keberadaan peradaban historis, karena itu dikatakannya:

“Maka, agama menyediakan ideologi dalam kohesi sosial bagi banyak pemberontakan dan gerakan pembaruan dalam peradaban historis; agama memainkan peranannya yang iebih dinamis. Kita hendaknya tidak melupakan kenyataan bahwa pada sebahagian besar peradaban historis dalam periode waktu yang panjang, memainkan fungsi

¹⁵Safrudin Bahar dkk, Risalah Sidang BPUPKI/PPKI ., p.420.

pemberi legitimasi dan penguatan kembali terhadap tatanan sosial yang ada. Kehidupan tidak kembali menjadi ‘sebuah kemungkinan’, tetapi telah berkembang menjadi ‘kemungkinan yang tak terbatas’. Analisis bahwa manusia modern adalah se kular, materialistik, dehumanisasi, tidak religius. Usaha-usaha untuk menjadikan agama sejalan (sesuai fungsinya) dengan situasi modern.”¹⁶

Agama-agama harus merubah ‘world view’ nya untuk memperbaiki atau mengontrol keadaan realitas sosial di dalam konteks modernisasi peradaban. Agama harus dinamis; tidak statis-memaksakan masyarakat kembali ke world view primitif.

Tentu, agama-agama dalam konteks Indonesia turut merubah ‘world view’-nya sesuai konteks plural agama yang sejalan bergulirnya modernisasi. Anggapan bahwa dialog teologis tidak mungkin dilakukan adalah suatu kekonyolan agama-agama. Alasannya, karena agama adalah bagian kebudayaan, Koentjaraningrat menuliskan:

“Kerangka kebudayaan berupa tiga lingkaran konsentris yang terbagi dalam tujuh sektor, yaitu: bahasa, kesenian, religi, ilmu pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi. Setiap sektor ini diproduksi dalam tiga wujud yaitu : gagasan/pikiran, kompleks aktivitas, dan benda yang dihasilkan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan kebudayaan nasional Indonesia perlu berorientasi ke zaman kejayaan nenek-moyang bangsa Indonesia yang telah lampau, tetapi juga ke zaman sekarang; dimana kebudayaan perlu memberi kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk menghadapi peradaban dunia masa kini. Kebudayaan Nasional Indonesia harus dibangun oleh orang-orang yang bermentalitas “modern”, yaitu mentalitas yang memberi kemampuan untuk memilih apa yang baik dan apa yang tidak baik”.¹⁷

Dan aras kebudayaan, bangsa Indonesia memiliki warisan religi, yang saya sebut “teologi-politik kebangsaan” yaitu: “Atas rahmat Tuhan Yang Mahakuasa-semua buat semua” dari para tokoh pendiri bangsa Indonesia, yang harus diterapkan dalam tiga wujud kebudayaan: gagasan, aktivitas dan hasil kerja dalam mentalitas modern.

Para teolog antar-agama Indonesia mesti tetap konsisten pada pemahaman dalam arti transformatif bahwa ‘Yang Mutlak’ itu disebut oleh setiap bangsa di dunia sesuai dengan budaya mereka masing-masing. John Hick¹⁸ mengatakan bahwa ‘Yang Kekal’ itu masuk ke dalam dimensi kesadaran pemikiran spritualitas setiap orang di dalam sejarah masing-masing bangsa. Selanjutnya para pemimpin antar-agama memberikan kontribusi perspektif keagamaan bagi kepentingan politik negaranya, dengan pemikiran yang berdasarkan iman ‘teologi politik kebangsaan’ Indonesia, di setiap kesempatan dan setiap situasi politik, sebagai mana dikatakan oleh John B.Cobb,Jr.¹⁹

Transformasi antar-agama di Indonesia dengan ‘teologi-politik kebangsaan’ men jamin kebebasan keagamaan dan dominasi agama versi ‘asing’. Setiap agama di Indonesia berjalan dalam aras budaya dan keagamaan versi Indonesia di sepanjang waktu dan situasi modern dengan mentalitas

¹⁶Robert N.Beflah, BEYOND BELIEF-Menemukan kembali Agama. p. 55,63,64.

¹⁷ Koentjaraningrat, Persepsi tentang kebudayaan Nasional, dari Alfian (Ed), Gramedia-Jakarta, 1985, p. 106,138.

¹⁸ John Hick, God has many name. The West Minster Press-Philadelphia USA, 1980,p.44. Menulis: “Thus in the earliest stages of religious history the Eternal One was reduced in human awarness to the dimension of man’s own image, so that the gods were like human kings, or again to the more cosmic dimension.

¹⁹John B.Cobb,Jr, Process theology as Political theology, The Westminster Press, Philadelhia USA, 1982,p.83 :“Political theology is not theology subordinated to politics. It is attempt to think faithfully in our time and situation. But political theology calls on the church to think politically.”

modernisasi pula. Dalam transformasi antar agama, John Cobb²⁰ berpendapat, bawa bukan menjadikan agama tertentu menjadi dasar bersarna (*commond ground*). Setiap agama tidak absolut tetapi relatif, dalam arti saling terbuka diperkaya oleh agama lainnya. John Titaley²¹ mengatakan bahwa

Tuhan dipahami tidak terbatas pada kesaksian dan ‘world view’ kebudayaan dan religi masyarakat zaman atau konteks kitab suci tertentu tidak memadai lagi; dan lagi Tuhan tidak statis dan pensiun setelah Alkitab (kitab suci) dikanonkan, tetapi Tuhan bekerja terus dalam sejarah manusia dengan segala kemampuan dan keterbatasannya maka patutlah manusia itu beragama dalam roh zamannya.

Pemahaman seperti ini berarti mengurung Tuhan di dalam kitab suci, serta mengurung masyarakat ke dalam kitab suci masing-masing. Orang Indonesia yang plural sesungguhnya sudah diajak merdeka dari kurungan keagamaan seperti itu, oleh para pendiri bangsa sejak tahun 1945 lewat teologi-politik kebangsaan “semua buat semua-atas rahmat Tuhan Yang Mahakuasa”, dan dimampukan menafsirkan wahyu Tuhan di sepanjang perjalanan sejarah bangsanya sendiri. Juga sudah bebas dari teologi kolonialis yang sudah berabad-abad mengkotak-kotakkan Indonesia dengan *divide et infera*, selain dikotak-kotakkan oleh *world view* konteks asal kitab suci (India, Arab, Yahudi, dan Barat).

Dalam perjalanan politik Bellah dan Hammond²² mengingatkan bahwa adanya kecenderungan bagi setiap pemecahan persoalan ketegangan adalah memposisikan agama sebagai pelayan negara atau negara sebagai pelayan agama. Untuk mempertahankan hak azasi manusia : hidup, bebas dan memperoleh kebahagiaan, maka pemerintah dibentuk dari warga masyarakat dan mendapat kuasa oleh persetujuan yang diperintah. Apabila pemerintah tidak mampu atau merusak hal-hal tersebut, masyarakat berhak mengganti dan meniadakannya. Menghadapi situasi politik di Indonesia yang banyak agama dan banyak kemiskinan, diperlukan reformasi *Nation Building*, yaitu mengembangkan rasa kebangsaan secara *Governance*, perbaikan dua arah: masyarakat dan pemerintah memakai kata “kami” dalam menangani problem publik, Hetifah Sj. Sumarto menulis:

“Governance yang baik adalah mekanisme kerjanya pemerintah dan warganegara dengan kekuatan saling mendukung, dimana warga turut aktif dengan kesadaran bersama; dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan melibatkan diri. Kualitas governance adalah faktor terpenting untuk menjamin suksesnya upaya menghapuskan kemiskinan dan membangun fondasi masyarakat berkeadilan sosial.”²³

Pertanyaannya adalah : apakah agama dan politik Indonesia membebaskan atau justru mengurung atau menekan masyarakat? Agama-agama di Indonesia dapat menjalankan fungsinya selaku kontribusi sentral dengan teologi politik kebangsaan demi ‘general will’ yaitu hidup, kebebasan dan kebahagiaan. Mekanisasi untuk merealisasikan adaiah governance, sebagai implikasi demokrasi mengatasi problem publik, misalnya ekonomi dan kemiskinan. Wogaman mengatakan bahwa, di dalam

²⁰ John B. Cobb, Jr, *Transforming Christianity and the World*, Orbis Books, Maryknoll USA, 1999, p.

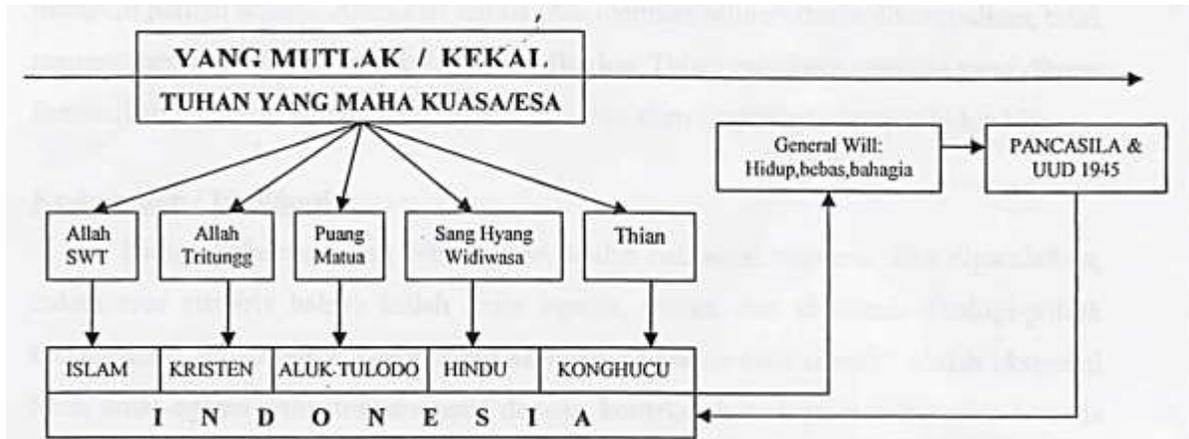
45, mengatakan : “If being a Christian means unqualified affiliation of any form Christianity has ever taken, I cannot be a Christian. But in fact such an affiliation would not be a Christian at all. It would be idolatrous and faithless. It would be absoluting the relative and refusing to attend to the call of the living Christ. But to give complete devotion to the living Christ.”

²¹ John Titaley, *Agama dan Demokrasi mungkinkah?*, dalam buku Iman, & kepedualian Sosial-kenangan 70 tahun Sutarno, Satya Wacana University Pres, Salatiga, 2005, p. 23, 26.

²² Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, *Varietas Of Civil Religion* (Terj), IRCISoD-Jakarta, 2003, p. 27, 35.

²³ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi. Partisipasi dan Governance*. Yayasan Obor-Jakarta 2004, p. 4.

demokrasi masyarakat bebas mengekspresikan pendapat dan mempraktekkan agamanya; tapi yang penting, agar semua pihak menyangkal ke-eksklusivismenya masing-masing.²⁴ Namun upaya mencegah dominasi mayoritas dalam demokrasi, kita dapat belajar dan praktek demokrasi (sistem parlementer) di Amerika, yang dituliskan Fareed Zakaria²⁵, bahwa perlu dua orang utusan setiap suku dan agama, tanpa membedakan jumlah populasi yang diwakili, sehingga kekuasaan bukan pihak mayoritas, namun melindungi pihak minoritas.



Agama harus bersatu dalam aras ‘beyond’ (melampaui) agama masing-masing memasuki dunia global yang sedang menghadapi persoalan manusia dan alam. Knitter²⁶²⁷ mengatakan: ”Masalah yang sama yang saya maksudkan adalah kenyataan penderitaan yang menguras kehidupan dan membahayakan masa depan manusia dan planet ini.” Agama harus memberi kontribusi untuk mengatasi penderitaan dengan menghidupkan sumber daya moral dan spiritual dengan ‘persaudaraan antar-agama’ yang adalah prasyarat ‘ketertiban dunia’ merupakan agenda internasional Indonesia. Agama-agama di Indonesia mesti mengangkat komitmen bersama untuk mengubah dan menyempuniakan masyarakat yang dilandasi iman bersama “Atas rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, semua buat semua”

Agama-agama Indonesia mesti menerapkan Etik Global yang oleh Parlemen Agama-agama sedunia (Chicago, 1993), lewat tulisan Hans Kung “Global Responsibility”

“No survival without A World Ethic (Tiada kelangsungan hidup yang baik, tanpa sebuah Etika Dunia). No World peace without Religious peace (Tiada perdamaian tanpa perdamaian agama). No Religious peace without Religious Dialogue (Tiada perdamaian agama tanpa dialog antar-agama). Dialog antar agama telah diadakan dan merumuskan Etika Global dalam empat dimensi kehidupan: Dimeusi Kosmis, cara hidup hubungan manusia dan alam, dengan komitmen solidaritas dengan manusia dan lingkungan hidup Non-kekerasan dan hormat pada kehidupan. Dimensi antropologis, cara hidup kemitraan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan. Dimensi Sosio ekonoinis-Politis, cara kehidupan

²⁴Philip Wogaman, Christian perspectives on Politics, Westminster John Knox Press-Louisville, Kentucky, 1988, p. 261, :“In a democratic society, such people should be free to express their view and practice their worship. But the very existence of such a society stand as a contradiction of their exclusivism and denying itself.

²⁵Fareed Zakaria, Masa depan Kebebasan, Publikatama-Jakarta 2004, p. 13.

²⁶Paul, F. Knitter, Satu Bumi banyak Agama, BPK-GM, Jakarta, 2004, p. 84.

²⁷Hans Kung, Global Responsibility, Crossroad Publishing-New York, 1991.

budaya solidaritas dan tata ekonomi yang adil. Dimensi religious, bukan persoalan siapa dan bagaimana Tuhan, tetapi ‘setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi’

Para pemimpin agama diwajibkan berwawasan Nasional dan juga Global yang serba plural. Untuk mengurus manusia dan alam serta-merta tidak lagi menghabiskan waktu membicarakan Tuhan, karena tidak mungkin pernah selesai. Andaikan semua manusia seluruh dunia dikumpulkan, tidak mampu memikirkan atau membela Tuhan. Biarkan Tuhan membela manusia yang ditransformasikan pada solidaritas terhadap manusia dan alam lingkungan tempat hidup kita. Umat beragama hendaklah memiliki sikap Inklusif-transformatif terhadap sesama umat beragama dalam konteks bersama umat yang serba Plural.

Hans Kung, oleh Parlemen Agama-agama se Dunia dalam perspektif Etika global menyusun sikap umat beragama sedunia memegang prinsip : *No survival without World Ethic* (Tiada keberlangsungan hidup tanpa Etika Dunia), *No World Peace without Religious Peace* (Tiada kedamaian Dunia tanpa Kedamaian Agama), *No Religious peace without Religious Dialogue* (Tidak ada kedamaian Agama tanpa Dialog Agama-agama). Dalam pada itu secara Teologia, Agama-agama dunia ini mengajarkan:

1. Confusius (551 SM): “Apa yang kamu sendiri tidak inginkan, jangan kamu lakukan pada orang lain.” (Peribahasa 15:32).
2. Rabbi Hillel- Judaisme: “Jangan kamu lakukan pada orang lain, apa yang tidak kamu inginkan mereka lakukan kepadamu.” (Shabbat 31a)
3. Yesus-Nazareth: “Apa yang kamu inginkan dilakukan orang lain bagimu, lakukanlah demikian kepada mereka.” (Matius 7:2)
4. Islam :”Tak seorangpun diantara kamu yang beriman, sepanjang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri.” (40 Hadits Nawawi)
5. Jainisme: “Manusia sesungguhnya acuh terhadap benda-benda duniawi dan memperlakukan semua ciptaan di Dunia sebagaimana mereka sendiri ingin diperlakukan.” (Sutrakritanga I,11,33)
6. Buddhisme:”Keadaan yang tidak menenangkan, atau menyenangkan bagiku akan juga demikian bagi dia; dan bagaimana saya bisa membebani orang lain dengan keadaan yang tidak menyenangkan saya.” (Samyutta Nikaya V,353,35, 342,2).
7. Hinduisme: “Siapun tidak boleh memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak menyenangkan mereka sendiri; demikianlah esensi moralitas.” (Mahabrata XII 114,8).²⁸

Ajaran Etika Global mengatakan bahwa baik secara etika maupun secara teologis menyatakan bahwa kehidupan haruslah dilangsungkan dengan tidak menyusahkan bagi pihak lain. Demikian juga Soekarno mengatakan bahwa setiap agama yang ada di Indonesia menjalankan agamanya sesuai dengan konteks Indonesia. Digambarkannya bahwa manusia dengan setiap agamanya seumpama dengan lima orang buta meraba gajah. Olehnya ada yang meraba belalai mengatakan gajah itu seperti ular. Orang yang meraba perut gajah mengatakan gajah itu seperti dinding. Orang yang meraba kaki mengatakan bahwa gajah itu seperti pohon. Orang yang meraba telinga mengatakan Gajah itu seperti tampah. Orang yang dibawah perut tidak meraba apap, tetapi mendengar nafas gajah sehingga ia mengatakan gajah itu seperti hawa.²⁹

Dengan demikian kita melihat bahwa baik etika global maupun agama dalam pandangan global termasuk agama-agama di Indonesia hendaklah mempersatukan persepsi seperti yang

²⁸ Hans Kung *Global Responsibility*, Crossroad - New York, 1991

²⁹ Dinson Saragih *Religiusitas Bangsa Indonesia*, Satyawacana Press – Salatiga, 2014, h.82

digambarkan dalam Etika –Teologi Global dan agama-agama di Indonesia hendaklah tidak saling mempersalahkan, tetapi mempersatukan persepsi demi kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran yang diperoleh dari masing-masing agama.

Kesimpulan/implikasi:

Hidup, kebebasan dan kebahagiaan adalah hak azasi manusia. Jika diparalelkan, dalam aras empiris bahwa inilah tugas agama, politik dan ekonomi. Teologi-politik kebangsaan “atas rahmat Tuhan Yang Mahakuasa-semua buat sernua” adalah ekspresi iman antar-agama yang transformatif dengan konteks kebudayaan dan realita historis Indonesia, tentu memodernisasi mentalitas masyarakat Indonesia. Demokrasi Indonesia juga perlu ditransformasikan menjadi ‘demokrasi parlemen’ sesuai kepluralan suku dan agama di Indonesia. Nation building dilakukan dalam mekanisme governance yaitu kerjasama dua arah kekuatan antara masyarakat dan pemerintah yang saling mendukung, mencapai kebahagiaan bersama, berazaskan Pancasila dan UUD’45.

Agama di Indonesia mesti transformatif dengan menempatkan konsep “Tuhan” yang termaktub di dalam Pembukaan UUD’45 dipakai oleh semua agama, dan konsisten pada Pancasila; maka kebersamaan dapat realisasi. Semua pihak agar tidak memperalat agama demi merebut kekuasaan. Agama berpartisipasi membina umatnya berpikir dan bertindak demi ketertiban bangsa dan dunia, berfokus pada pelayanan pembebasan manusi dan ekologi dari berbagai penderitaan. Menyebut Tuhan dengan nama apa, tidak lebih penting daripada pengentasan penderitaan. Dogma dan kebudayaan sudah saling melengkapinya.

Pemerintah mesti konsisten menjamin keamanan dan kebebasan bagi warganya mengekspresikan kehidupan keagamaan dalam aras pelayanan kemanusiaan tanpa membedakan agama atau suku yang plural, menjaga agar jangan ada yang termajinalkan. Pemerintah memang patut dihormati; tapi dituntut tanggungjawab atas warganya. Pemerintah hendaklah memasyarakatkan ‘teologi-politik kebangsaan’ dan ‘Etika Global’ bekerjasama dengan semua lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Pemerintah mesti menjadi mediator dalam rangka ini, demi keberhasilan kinerjanya sebagai abdi negara.

Daftar Pustaka

1. Andersen, Heine & Kaspersen, Lars Bo, *Classical and Modern Social Theory*, Black well Publisher-Massachussetes USA, 2000.
2. Hick, John, J, *God has many name*, The Westminster Press, Philadhelpia USA, 1982.
3. Knitter, Paul.F, *Satu bumi banyak agama*, BPK-GM, Jakarta, 2004.
4. Koentjaraningrat, *Persepsi tentang Kebudayaan Nasional, dalam Alfian (Ed)*, Gramedia — Jakarta, 1985.
5. Kung, Hans, *Global Responsibility*, Crossroad Publishers-New York, 1991.
6. PAKORBA-DPP, *Indonesia Menggugat*, Jakarta, 2001.
7. Setyohadi,Tuk, *Sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa*, Rajawali Cooperation-Bogor, 2003
8. Sunarto, Hetifah.Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Obor-Jakarta, 2004.
9. Suwondo, Kutut, *Otonomi daerah dan Perkembangan Sivil Society di aras Lokal*, Satya Wacana Press-Salatiga, 2005.
10. Titaley, John.A, “*Agama dan Demokrasi mungkinkah?*”, Iman & Kepedulian Sosial Satya Wacana University Press-Salatiga, 2005.
11. Veeger,J, *Realitas Sosial*, Gramedia-Jakarta, 1993.

12. Aritonang, Jan, *Sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, BPK-Gunung Mulia, Jakarta, 2004
13. Wogaman, J.Philip, *Christian Perspectives on Politics*, Westminster John Knox Press Louisville, Kentucky, 2001.
14. Yasni.Z, *Bung Hatta Menjawab*, Gunung Agung — Jakarta, 1980.
15. Zakaria Fareed, *Masa depan Kebebasan, Publikatama* — Jakarta, 2004.
16. Bahar, Saafroedin dkk. *Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia-Jakarta, 1995.
17. Bellah, Robert.N, *Beyond Belief-Menemuukan kembali Agama*, Paramadina-Jakarta,
18. Bellah, Robert.N & Hammond,E. Philip, *Varietas of Civil Religion*, IRCISoD:Yogyakarta, 2003
19. Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, Kanisius Yogyakarta, 1994.
20. Cobb.John.B.Jr, *Process Theology as Political Theology*, Westminster Press-Philadelpia USA, 1982.
21. _____, *Transforming Christianity and the World*, Orbis Books, Maryknoll, New York USA, 1999.
22. Dharmaputera, Eka, *Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia*, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 2001.
23. Saragih Dinson *Religiusitas Bangsa Indonesia*, Satyawacana Press – Salatiga, 2014